

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai sekitar 17.504 pulau yang tersebar diseluruh wilayahnya. Tiap wilayahnya mempunyai potensi kekayaan alam yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Keberagaman potensi di setiap wilayah menyebabkan pemerintah menerapkan pendekatan yang berbeda dalam proses pembangunan. Selain itu, banyaknya penduduk Indonesia hingga mencapai kurang lebih 270 juta jiwa pada tahun 2020, ditambah dengan perbedaan geografis, membuat beberapa wilayah sulit diakses untuk proses pembangunan.

Secara umum, pembangunan sebagai suatu aktivitas yang dikerjakan untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan merata secara menyeluruh untuk mencapai kemakmuran nasional. Menurut Sbardella et al., (2017) Pembangunan adalah suatu perubahan yang bukan hanya dilihat dari sisi kuantitatif, melainkan juga kualitatif, yang bergerak maju. Ini bukan sekadar mengenai hal-hal yang menjadi lebih besar, lebih kecil, atau tetap sama. Pembangunan dicirikan dengan perubahan pada segala aspek, termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.

Kesenjangan merujuk pada ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat individu maupun kelompok. Masalah ini sering muncul di tiap negara, baik yang maju maupun yang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, ketimpangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan kondisi demografis dan variasi jumlah kekayaan alam yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, ketimpangan juga disebabkan oleh terfokusnya aktivitas ekonomi di daerah tertentu seperti DKI Jakarta yang termasuk wilayah Pulau Jawa dan pernah menjadi Ibukota Negara Indonesia.

Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan cenderung terpusat di Provinsi DKI Jakarta.

Pulau Jawa mempunyai jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Diperkirakan separuh lebih populasi Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Dapat ditunjukkan melalui total penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 sebanyak 151.591.300 jiwa dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.270.699 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di enam provinsi Pulau Jawa. Sementara itu, provinsi di luar Pulau Jawa terdiri dari 18 provinsi. Pembangunan di Wilayah Timur cenderung tertinggal dibandingkan Pulau Jawa. Dikarenakan perhatian pemerintah berfokus pada pembangunan dan perekonomian di Pulau Jawa. Hal inilah yang menyebabkan wilayah di Kawasan Timur masih dalam tahap proses pengembangan. Berikut ini adalah besaran kontribusi PDRB dari masing-masing Pulau di Indonesia.

**Tabel I.1**  
**Kontribusi PDRB Menurut Pulau di Indonesia Pada Tahun 2017-2020**

No	Pulau	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sumatera	21,73%	21,55%	21,28%	21,36%
2	Jawa	58,38%	58,43%	58,91%	58,75%
3	Kalimantan	8,23%	8,18%	8,05%	7,94%
4	Bali & Nusa	3,11%	3,05%	3,06%	2,94%
5	Sulawesi	6,12%	6,33%	6,46%	6,66%
6	Maluku & Papua	2,42%	2,47%	2,24%	2,35%

Sumber: Diolah oleh penulis

Kontribusi PDRB antar pulau di Indonesia selama periode 2017-2020 mengalami fluktuasi, dipicu oleh wabah virus Covid-19 pada awal periode 2020. Berdasarkan data tersebut, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Indonesia. Menurut data BPS periode 2017-2020, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa menyumbang lebih dari separuh total PDRB dengan rata-rata sebesar 58,61% selama lima tahun. Jika ditambah dengan kontribusi PDRB Pulau Sumatera yang rata-ratanya sebesar 21,48% selama lima tahun, maka Kawasan Barat (Jawa dan Sumatera)

berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 80,09%. Sisanya, kurang dari 20 persen atau tepatnya 19,91%, berasal dari Pulau Kalimantan dengan rata-rata PDRB sebesar 8,1%, Bali dan Nusa Tenggara (3,04%), Sulawesi (6,39%), serta Maluku dan Papua sebesar 2,37%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antar pulau di Indonesia menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antar Pulau di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh PDRB yang memperlihatkan tinggi rendahnya kontribusi masing-masing Pulau di Indonesia. Di samping itu, ketidakseimbangan yang terjadi antar wilayah di Indonesia juga dapat dilihat dalam data IPM. Dibawah ini merupakan data IPM di setiap provinsi Pulau Jawa dan Kawasan Timur pada periode 2017-2021.

**Tabel I.2**

**IPM Menurut Provinsi Di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Tahun 2017-2021**

No	Provinsi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DKI Jakarta	80,06	80,47	80,76	81,92	82,25
2	Jawa Barat	70,69	71,30	72,03	72,61	72,96
3	Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,88	72,17
4	DI. Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,95	80,22
5	Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	73,04	73,48
6	Banten	71,42	71,95	72,44	74,41	74,68
7	NTB	66,58	67,30	68,14	70,46	70,86
8	NTT	63,73	64,39	65,23	66,93	67,02
9	Sulawesi Utara	71,66	72,20	72,99	73,67	74,03
10	Sulawesi Tengah	68,11	68,88	69,50	70,31	70,54
11	Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	73,08	73,38
12	Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,61	71,82
13	Gorontalo	67,01	67,71	68,49	69,51	69,82
14	Sulawesi Barat	64,30	65,10	65,73	68,40	68,64
15	Maluku	68,19	68,87	69,45	71,34	71,55
16	Maluku Utara	67,20	67,76	68,70	69,30	69,56
17	Papua Barat	62,99	63,74	64,70	65,94	66,11
18	Papua	59,09	60,06	60,84	61,22	61,40

Sumber: BPS Indonesia 2016-2020

Menurut tabel 1.2, tingkat IPM di setiap wilayah Pulau Jawa dan Kawasan Timur sebagian besar mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Akan tetapi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Kawasan Timur sedikit tertinggal apabila dibandingkan dengan tingkat IPM di Pulau Jawa. Hal ini dapat diukur berdasarkan kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia. Nilai IPM  $< 60$  masuk dalam kategori rendah, sementara nilai 60–70 termasuk kategori sedang. Wilayah dengan IPM diantara 70-80 termasuk kategori tinggi, dan nilai IPM  $> 80$  masuk dalam kategori sangat tinggi (Mongan, 2019).

Data IPM tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam kategori tinggi di Kawasan Timur. Di Pulau Jawa, provinsi yang masuk dalam kategori tinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten. Sementara itu, Provinsi NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara masuk dalam kategori sedang. Provinsi Papua dan Papua Barat masuk dalam kategori rendah. Di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi.

Masalah ketidakseimbangan di tiap wilayah Pulau Jawa dan Kawasan Timur bisa dianalisis menggunakan alat ukur Indeks Williamson. Indeks Williamson mengukur besar kecilnya tingkat disparitas pembangunan daerah dengan data PDRB per kapita dan total penduduk di setiap wilayah. Nilai IW diantara 0 sampai 1. Ketika mendekati 0 memperlihatkan ketimpangan pembangunan wilayah rendah atau seimbang pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menandakan kesenjangan pembangunan wilayah tinggi atau ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah (BPS, 2017). Tingkat kesenjangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa dan Wilayah Timur diketahui melalui tabel Indeks Williamson di bawah ini.

**Tabel I.3**  
**Indeks Williamson Pulau Jawa Dan Kawasan Timur Tahun 2017-2021**

No	Provinsi	Tahun					Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	DKI Jakarta	0,510	0,512	0,520	0,491	0,483	0,503
2	Jawa Barat	0,699	0,699	0,691	0,674	0,732	0,699
3	Banten	0,627	0,628	0,627	0,629	0,634	0,629
4	Jawa Tengah	0,644	0,637	0,631	0,655	0,652	0,643
5	D.I Yogyakarta	0,480	0,480	0,470	0,470	0,470	0,474
6	Jawa Timur	0,961	0,965	0,971	0,974	0,982	0,970
7	NTB	0,800	0,596	0,569	0,731	0,704	0,680
8	NTT	0,658	0,663	0,663	0,629	0,630	0,648
9	Sulawesi Utara	0,498	0,502	0,502	0,489	0,497	0,497
10	Gorontalo	0,148	0,146	0,143	0,191	0,193	0,164
11	Sulawesi Tengah	0,537	0,911	1,000	1,112	1,236	0,959
12	Sulawesi Selatan	0,680	0,691	0,683	0,695	0,770	0,703
13	Sulawesi Barat	0,359	0,351	0,342	0,331	0,335	0,343
14	Sulawesi Tenggara	0,622	0,614	0,611	0,571	0,486	0,580
15	Maluku	0,259	0,250	0,243	0,221	0,443	0,283
16	Maluku Utara	0,276	0,275	0,277	0,354	0,581	0,352
17	Papua Barat	1,474	1,468	1,463	1,498	1,449	1,470
18	Papua	2,125	2,195	1,522	1,415	1,838	1,819

Sumber: Diolah oleh penulis

Menurut tabel diatas, tingkat kesenjangan di setiap provinsi Indonesia terutama pada Pulau Jawa dan Kawasan Timur selama periode 2017-2021 cukup tinggi. Terdapat empat (4) kategori tingkat ketimpangan, yaitu: sangat tinggi (>1), tinggi (0,7-1), sedang (0,4-0,69) dan rendah (<0,39). Berikut ini adalah kisaran tinggi rendahnya tingkat ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat ketimpangan kategori sangat tinggi, yaitu Provinsi Papua Barat (1,470) dan Papua (1,819). Selanjutnya provinsi dengan tingkat ketimpangan kategori tinggi diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur (0,970) Sulawesi Tengah (0,959) dan Sulawesi Selatan (0,703). Di sisi lain, provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan kategori sedang diantaranya adalah Provinsi DKI. Jakarta (0,503), Jawa Barat (0,699), Banten (0,629),

Provinsi D.I Yogyakarta (0,474), Jawa Tengah (0,643), Provinsi NTB (0,680), NTT (0,648), Provinsi Sulawesi Utara (0,497) dan Sulawesi Tenggara (0,580). Sedangkan provinsi dengan tingkat ketimpangan kategori rendah yaitu Provinsi Gorontalo (0,164), Sulawesi Barat (0,343), Maluku (0,283), dan Maluku Utara (0,352).

Data diatas menunjukkan Pulau Jawa dan Kawasan Timur memiliki masalah yang sama yaitu ketimpangan, namun yang membedakan adalah besar kecilnya tingkat ketimpangan tersebut. Permasalahan diatas selaras dengan Teori Neo Klasik yang diusulkan oleh Douglas C North, yaitu terdapat keterkaitan antara pengembangan ekonomi dengan kesenjangan pengembangan wilayah. Berdasarkan asumsi itu, pada fase awal pembangunan, kesenjangan suatu wilayah cenderung tinggi. Ini berkelanjutan sampai kesenjangan dalam pembangunan mencapai puncaknya. Kemudian, apabila pembangunan terus dilakukan, secara perlahan kesenjangan pembangunan wilayah tersebut akan berkurang.

Menurut Sjafrizal dalam Suntari & Yunani (2019), adanya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pembangunan, diantaranya: 1) kesenjangan SDA, 2) kesenjangan keadaan demografis, 3) kesenjangan alokasi dana pembangunan, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi, 5) mobilitas produksi yang tidak lancar. Adanya faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan terjadi karna adanya perbedaan dalam berbagai aspek. Perbedaan ini muncul karna kurangnya keteraturan dalam proses pembangunan yang berdampak pada perbedaan kemampuan suatu wilayah dalam melakukan proses pembangunan. Perbedaan proses pembangunan ini akan menyebabkan ketimpangan pembangunan semakin tinggi sehingga menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial antar wilayah.

Mendukung pernyataan diatas, Hadju et al., (2021) mengatakan bahwa, kesenjangan memunculkan masalah yang besar seperti persoalan penduduk, ekonomi, sosial dan politik, serta lingkungan apabila tidak diatasi secara cepat dan hati-hati. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memfokuskan

perhatiannya pada pemerataan pembangunan wilayah terutama di Pulau Jawa dan Kawasan Timur. Dikarenakan, permasalahan disparitas pembangunan wilayah ini dapat menjadi penghalang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu menginvestasikan dananya pada sektor-sektor yang penting seperti perumahan dan fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan. Diharapkan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur seperti fungsi perumahan dan fasilitas umum dapat membantu semua masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, penggunaan dana pada sektor pendidikan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Sedangkan, penggunaan dana pada sektor kesehatan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan tingkat kematian.

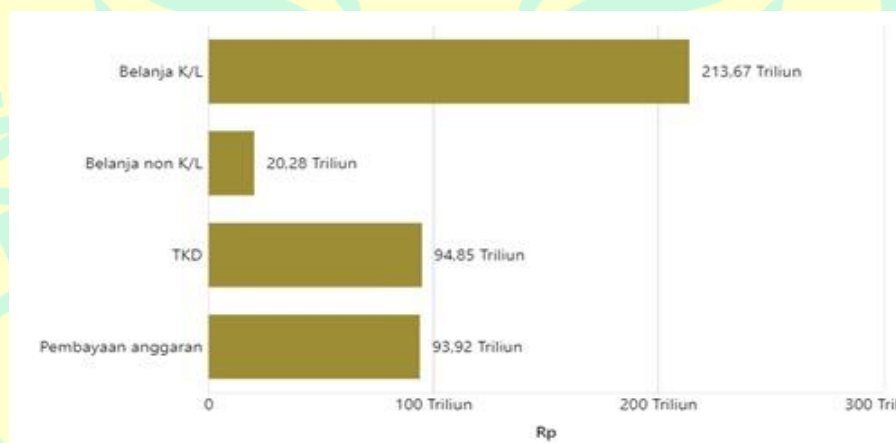
Pada dasarnya anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi yang bertujuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Suparno dalam (Safira et al., 2019) mengatakan bahwa, ketika pemerintah mengalokasikan dananya pada ketiga sektor tersebut, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasakan dampak kebijakannya, sehingga diperlukan data runtut (*time series*).

Hukum Wagner, mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Wu et al., 2010). Peningkatan pembangunan antar wilayah dapat dicapai dengan meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam APBN 2024 yang dialokasikan untuk belanja prioritas seperti:

1. Anggaran pendidikan sebesar Rp. 665 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta keterampilan SDM.

2. Anggaran kesehatan sebesar Rp. 187,5 triliun untuk mempercepat penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan di Indonesia.
3. Anggaran Infrastruktur sebesar Rp. 423,4 triliun untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan dasar (Dianto & Fajri, 2023).

Pentingnya infrastruktur dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa diabaikan. Pernyataan itu didukung oleh hasil kajian dari berbagai pakar dan lembaga yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berdampak pada kemampuan ekonomi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan potensialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan sinyal penting dari pertumbuhan ekonomi di sebuah negara yang merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah (Wu et al., 2010). Berikut adalah detail anggaran untuk pembangunan infrastruktur:



**Gambar I.1**  
**Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN (2023)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada umumnya, infrastruktur mengarah pada fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Infrastruktur diartikan sebagai modal publik yang terdiri dari jalan, jembatan, tenaga listrik, air, sanitasi dan pemukiman. Pemukiman dan fasilitas umum adalah suatu bentuk pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam kebijakan strategis RAPBN



tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sebesar Rp 32,77 triliun. Dana yang disediakan untuk sektor ini digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional di sektor pemukiman. Sasaran utama dari pembangunan pada fungsi ini adalah demi memudahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses tempat tinggal yang layak huni dengan membangun 11.400 unit rumah susun sewa. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum serta sanitasi yang mencukupi dan berkelanjutan dengan dibangunnya 872.290 rumah dilengkapi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, wilayah pemukiman kumuh akan berkurang karena kebutuhan hunian dan pemukiman yang layak akan dipenuhi di area seluas 17.668 hektar.

Selanjutnya, sektor pendidikan sangat penting untuk memperbaiki kualitas SDM. Dalam suatu UU No. 20 Tahun 2003 terkait SISDIKNAS berisikan pendidikan merupakan upaya yang disengaja serta direncanakan demi menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman supaya peserta didik bisa secara aktif meningkatkan kemampuannya. Ini mencakup pengembangan keagamaan, pencegahan diri, individu, pengetahuan, karakter, dan kemampuan lainnya yang dibutuhkan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Disdikpora Buleleng, 2014). Human Capital Theory berpendapat, pendidikan memiliki dampak positif pada pengembangan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas SDM. Pendidikan dengan kualitas yang baik akan memberikan dampak positif pada perekonomian dengan meningkatkan kemampuan individu serta kreativitas dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk meningkatkan produktivitas.

Alinea keempat dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 berisikan maksud Pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pada pasal 31 ayat 4 disebutkan pemerintah akan menargetkan biaya pendidikan setidaknya 20% total APBN dan APBD demi mencukupi keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional (Faizal, n.d.). Untuk

menciptakan SDM yang unggul, berinovatif, mempunyai integritas, dan memiliki daya saing, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp660,8 triliun atau 20% dari APBN 2024 untuk pendidikan. Anggaran ini terdiri dari dana pemerintah pusat senilai Rp237,3 triliun, dana transfer ke daerah sebesar Rp346,6 triliun, dan penggunaan investasi senilai Rp77 triliun. Dana pendidikan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp612,2 triliun (Jatnika, 2023).



**Gambar I.2**

**Anggaran Pendidikan Tahun 2016-2021**

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN, dana pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Antara tahun 2016 sampai 2019, total pendapatan naik dari Rp370,810.2 triliun menjadi Rp460,316.8 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 7,5%. Di tahun 2020, dana pendidikan melonjak terus hingga Rp547,833.2 triliun, yang menandakan meningkat sebesar 19,0% dibandingkan realisasi tahun 2019. Meski demikian, pemerintah masih berusaha memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Perbedaan kualitas pendidikan antara Indonesia dan negara lain masih besar. Terdapat cara melihat kualitas pendidikan yaitu melalui skor PISA. Berdasarkan PISA 2018, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan oleh negara di dunia. Oleh karena itu, penilaian PISA ini seharusnya mendorong pemerintah untuk bukan hanya berfokus pada akses pendidikan, melainkan juga memperhatikan peningkatan mutu pendidikan.

Sementara itu, belanja pemerintah di sektor kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu hak atas layanan kesehatan. Dalam pembangunan nasional, penting untuk menjamin setiap warga negara mempunyai hak terhadap kesehatan yang stabil. Kesehatan merupakan investasi yang krusial untuk menjamin kualitas hidup setiap manusia. Kualitas SDM apabila dilihat dari segi kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi SDM, yang artinya kesehatan juga mempengaruhi kualitas manusia. Ketidakcukupan kalori, nutrisi atau minimnya tingkat kesehatan bagi masyarakat menyebabkan manusia memiliki mutu dan tingkat keterbelakangan mental yang rendah. Menurut WHO salah satu faktor penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang adalah faktor kesehatan. Maka perlu diperhatikan berbagai macam pelayanan kesehatan seperti, rumahsakit, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya (Sitorus & Yuliana, 2018).

Pemerintah akan berusaha untuk menaikkan alokasi dana kesehatan sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam menciptakan SDM yang memiliki kesehatan yang baik. Komitmen ini terlihat dari alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan dalam lima tahun terakhir. Anggaran kesehatan mengalami peningkatan berturut-turut, dimulai dari Rp119,9 triliun periode 2020, menjadi Rp124,4 triliun pada periode 2021, dan mencapai Rp134,8 triliun pada periode 2022, dan meningkat menjadi Rp172,5 triliun pada periode 2023, sebelum melonjak menjadi 186,4 triliun pada periode 2024 (Kemkes, 2023). Dalam bukunya Todaro & Smith (2012) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah tujuan dasar pembangunan. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat krusial demi menggapai hidup yang sejahtera. Sementara, pendidikan juga sangat krusial demi mendapatkan kehidupan yang layak dan bermanfaat. Kedua hal tersebut adalah hal yang paling mendasar terkait proses meningkatkan kemampuan manusia sebagai arti pembangunan itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi tujuan utama dalam mencapai pembangunan ekonomi. Secara umum, infrastruktur

merupakan penyediaan fasilitas umum yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan, pendidikan merupakan aset manusia yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan, karena pada dasarnya pendidikan adalah bentuk investasi. Kesehatan adalah inti dari kebahagiaan. Ketiga hal ini sangat esensial untuk mencapai kehidupan yang layak.

Dari penjelasan sebelumnya, menandakan bahwa analisis ini berfokus pada perbedaan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan Kawasan Timur. Dikarenakan Pulau Jawa sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia yang disebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Pulau Jawa dengan berlandaskan fakta bahwa Pulau Jawa lebih berkembang dari berbagai aspek dibandingkan daerah luar Pulau Jawa, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ketiga sektor ini akan membuka peluang ekonomi seperti tersedianya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang cenderung lebih tinggi dan membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar Pulau Jawa khususnya Kawasan timur untuk berpindah ke Pulau Jawa.

Kawasan Timur Indonesia, yang mencakup Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, sering kali tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Penelitian di kedua wilayah ini bertujuan untuk memahami dan mengatasi ketimpangan regional serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Perbedaan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Pulau Jawa Dan Di Luar Pulau Jawa".

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, didapatkan pertanyaan penelitiannya, yaitu:

1. Apakah belanja pemerintah daerah pada sektor infrastruktur mempengaruhi perbedaan kesenjangan pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Kawasan Timur?

2. Apakah belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan mempengaruhi perbedaan kesenjangan pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Kawasan Timur?
3. Apakah belanja pemerintah daerah di sektor kesehatan mempengaruhi perbedaan kesenjangan pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Kawasan Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pertanyaan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat seberapa besar dampak belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur terhadap perbedaan kesenjangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa dan Kawasan Timur.
2. Melihat seberapa besar dampak belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur terhadap perbedaan kesenjangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa dan Kawasan Timur.
3. Melihat seberapa besar dampak belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur terhadap perbedaan ketidakseimbangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa dan Kawasan Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitiannya diperlukan demi memperbanyak ilmu pengetahuan serta berfungsi sebagai bahan literatur bagi pembaca, khususnya terkait dengan pengaruh anggaran pemerintah daerah terhadap kesenjangan pembangunan wilayah di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Bahan informasi dan pertimbangan pemerintah daerah Pulau Jawa dan Kawasan Timur saat menentukan arah kebijakan untuk mengelola anggaran pemerintah sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan mencapai pembangunan yang lebih merata.

### **1.5. Kebaharuan Penelitian**

Hingga saat ini, masih jarang penelitian yang mengkaji dampak pengeluaran pemerintah, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Terutama pada perbedaan ketimpangan antara wilayah maju dengan wilayah berkembang di Pulau Jawa dan Kawasan Timur, tidak banyak dieksplorasi. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah secara umum. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

